

KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2024: TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG KOTA TANJUNGPINANG

**Oleh
Safira Indriyani
NIM. 2205040006**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya terkait kewenangan pemberian rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Tanjungpinang. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan teknis yang berpotensi memengaruhi kemurnian hak pilih serta integritas hasil pemilu, sehingga Bawaslu memberikan rekomendasi PSU pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Bawaslu dalam sistem penyelenggaraan pemilu bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi atas temuan maupun laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Rekomendasi PSU yang diberikan Bawaslu Kota Tanjungpinang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan guna menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum Bawaslu sangat strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui kewenangan pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada hasil pemungutan suara. Rekomendasi PSU di Kota Tanjungpinang menunjukkan peran Bawaslu sebagai instrumen pengawasan yang memastikan perlindungan hak pilih warga negara dan terwujudnya pemilu yang demokratis serta berkeadilan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Pemilu 2024, Kota Tanjungpinang.

**THE LEGAL STANDING OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY IN
HANDLING VIOLATIONS IN THE 2024 GENERAL ELECTION : A
STUDY OF THE RE-VOTING TANJUNGPINANG CITY**

By
Safira Indriyani
NIM. 2205040006

ABSTRAC

This study aims to analyze the legal position of the General Election Supervisory Agency in handling violations during the 2024 General Election, particularly concerning its authority to issue recommendations for re-voting in Tanjungpinang City. Is an election management body entrusted with supervisory, preventive, and enforcement functions regarding election violations as stipulated by applicable laws and regulations. During the implementation of the 2024 General Election, several administrative and technical violations were identified that had the potential to affect the integrity of voting rights and election outcomes. Consequently, election supervisory body issued recommendations for re-voting at several polling stations in Tanjungpinang City. The research employs a normative-empirical legal research method using statutory and conceptual approaches. The data utilized consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that election supervisory agency holds an independent legal position within the electoral administration system and possesses the authority to issue recommendations based on findings or reports of violations occurring throughout the election process. The recommendation for re-voting issued by election supervisory agency of Tanjungpinang City represents the implementation of its supervisory function in ensuring the realization of the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. The implementation of such recommendations serves as the basis for the General Election Commission to take further action in accordance with prevailing legal provisions. This study concludes that election supervisory agency occupies a highly strategic legal position in maintaining electoral integrity through its supervisory authority and its power to issue recommendations concerning violations that may affect voting results.

Keywords: Legal Position, election supervisory agenci, Election Violations, Re-Voting, 2024 General Election, Tanjungpinang City.